

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan pemerintah kepada publik. Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan penggunaan informasi keuangan atas lembaga-lembaga publik. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik. Kurangnya pemerintah dalam memberikan informasi keuangan menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah. Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan karena para pengguna dapat

mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis. Dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, maka kecurangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat diminimalisir. Setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat terpantau dan diharapkan dapat disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam laporan keuangan daerah. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yaitu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Sande,2013). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Sande, 2013). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan aksesibilitas laporan keuangan tersebut. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan

keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Sande, 2013). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, internet (*website*), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006).

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat atau mempunyai nilai bagi para pengguna. Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif. Kriteria dan unsur-unsur yang membentuk kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri atas : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Rohman, 2009). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat yang ada agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Rohman, 2009). Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (Zama, 2016). Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan penggunaan informasi keuangan, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD saja tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas agar laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah. Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses

pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dewasa ini, banyak timbul permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tulisan yang berhasil di unduh dari salah satu literatur di internet yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah. Tulisan yang berhasil dihimpun dari Surabaya.bpk.go.id pada tanggal 7 November 2019 dengan judul artikel “Lima tahun terakhir laporan keuangan Pemda Jatim makin tertib” sebagai berikut: Dijelaskan Novian (Kepala BPK perwakilan Jatim), pada penilaian tahun anggaran 2012, sebanyak 13 pemda meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 26 sisanya meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), 21 pemda meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan 1 pemda dinyatakan TW (Tidak Wajar). Selanjutnya pada 2014 sebanyak 25 pemda meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 14 pemda meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Pada 2015 sebanyak 31 pemda meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dia menyarankan agar pemda yang telah meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terus melakukan strategi untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pro aktif mengkonsultasikan permasalahan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperkuat Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan serta menindaklanjuti kecurangan (*fraud*), meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, TI (Teknologi Informasi) dan Inspektorat.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo kembali meraih prestasi dalam bidang keuangan. Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kembali diraih tahun ini. Penyajian keuangan tahun ini dinilai tanpa cela. Kalaupun ada catatan dianggap masih wajar. Mulai dari kelebihan bayar dan administrasi. Pemerintah Kabupaten juga dinilai responsif terkait catatan dan rekomendasi BPK, tentang adanya catatan administrasi pelaporan asset daerah tahun lalu. Karena data masing-masing SKPD belum sinkron dengan data pemkab. Selain itu, pemkab Ponorogo juga dinilai kooperatif dalam pengembalian kelebihan bayar. Potensi kelebihan bayar Rp 1,2 Miliar hasil audit BPK tahun anggaran 2016. Dengan rincian Rp 400 juta dari pengadaan barang dan jasa disejumlah SKPD dan Rp 800 juta disejumlah proyek fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun wakil bupati mengklaim nominal yang ada sangat kecil dan batas wajar dan pencapaian WTP hasil kerja keras semua SKPD (<http://beritajatim.com>, diakses 9 November 2019).

Faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah yaitu terkait sumber daya manusia. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami logika akuntansi secara baik. Pemerintah daerah yang

menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemerintah sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Kurangnya sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, umumnya pemerintah daerah mempunyai keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menguasai logika akuntansi secara baik. Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah yaitu terkait publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mulia, 2016).

Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, pengguna laporan keuangan daerah masih belum mudah mendapatkan akses laporan keuangan daerah melalui web resmi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo melalui alamat dppkad.ponorogo.go.id, dalam pilihan transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) tahun 2015 hingga 2017 belum bisa diakses dan tertulis “*Oops, you have encountered an error it appears the page you were looking for doesn't exist. Sorry about that.* (Ups, anda mengalami kesalahan tampaknya laman yang anda cari tidak ada. Maaf soal itu)”. Hal itu berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang jelas disebutkan salah satunya yaitu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media massa sehingga masyarakat dapat mengetahui atau mengaksesnya dengan mudah mengenai informasi keuangannya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2015) yang memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (studi kasus pada pemerintahan Kota Pekanbaru). Penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk mengembangkan penelitian tentang **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah ?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
2. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
3. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atau dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan bisa digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan pemahaman para akademisi tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

2. Bagi SKPD Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk SKPD Ponorogo sebagai bakal petunjuk, koreksi, serta evaluasi pada penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dan agar dapat lebih memahami pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

3. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk peneliti khususnya dalam meningkatkan pengetahuan terhadap pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dan pengambilan keputusan tentang isu-isu baru dalam penelitian berikutnya.

